PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Rabu Tanggal: 21 Juli 2021 Halaman: 9



LAYANGKAN SURAT TERBUKA KE GUBERNUR DIY

Ribuan PKL Malioboro Sekarat Akibat PPKM Darurat

YOGYA (KR) - Komunitas Kawasan Malioboro melayangkan surat terbuka kepada Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X agar memberikan toleransi dan kebijakan khusus bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Malioboro.

Kondisi ribuan PKL di kawasan Malioboro sangat kritis akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sehingga membutuhkan langkah-langkah luar biasa dan toleransi guna menyelamatkan seluruh komunitas yang menggantungkan kehidupannya di kawasan legendaris DIY tersebut.

Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro (Padma) Yati Dimanto menyatakan segenap PKL dan komunitas di kawasan Malioboro memahami sepenuhnya pentingnya kebijakan pemerintah menjaga kesehatan warga melalui penerapan PPKM Darurat ini. Akan tetapi, kebijakan tersebut semestinya dijalankan dengan mempertimbangkan dampak negatif yang serius bagi sendi-sendi kehidupan dan ekonomi PKL maupun seluruh komunitas di kawasan Malioboro.

"Ribuan PKL yang mencari nafkah di kawasan Malioboro sudah dalam kondisi sekarat saat ini. Penghasilan macet total, sehingga beban dampak ekonomi akibat Covid-19 yang selama ini sudah berat. terasa bertambah berat ratusan kali lipat dengan adanya PPKM Darurat ini," ujarnya di Yogyakarta, Senin (19/7).

Ketua Paguyuban PKL Malioboro-Ahmad Yani (Pemalni) Slamet Santoso mengungkapkan banyak menerima keluhan PKL mulai dari modal tergerus habis, hutang-hutang tidak terbayar dan terus bertambah. Pemenuhan kebutuhan keluarga PKL dalam kondisi kritis, ditambah dampak sosial dan psikologis yang mengikuti.

"Oleh karena itu kami mengharap, meminta dan mendesak agar Pemda DIY segera dan secepatnya mengambil langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan ribuan keluarga PKL di kawasan Malioboro," katanya.

Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) Desio Hartonowati menuturkan langkah luar biasa tersebut dapat dilakukan melalui memberi Bantuan Sosial Tunai (BST), memberi toleransi kepada PKL di kawasan Malioboro agar diperkenankan kembali berdagang dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang optimal serta membuka akses orang dan kendaraan ke Malioboro setelah 20 Juli 2021.

" Terakhir, pemerintah dapat memberikan stimulan hibah modal usaha bergulir bagi PKL melalui paguyuban dan koperasi yang menaungi PKL. Besar harapan kami agar suara, aspirasi dan rintihan seluruh PKL di kawasan Malioboro dapat diterima dan dipenuhi. Atas perhatian dan pengayoman Bapak Gubernur DIY, kami haturkan terima kasih," imbuhnya. **(Ira)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro 2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Maret 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005